

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Pada penelitian ini, terkait pada pembahasan sebelumnya terkait tingkat transparansi situs web pemerintah daerah pada Pulau Jawa dan Indonesia bagian Timur penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat transparansi situs web resmi pemerintah daerah kabupaten/kota pada seluruh variabel yang ada adalah 38,86% yang tergolong kepada kurang transparan. Dimana, provinsi dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 45,95% yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara provinsi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 31,10% yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Tingkat transparansi situs web resmi pemerintah daerah kabupaten/kota pada segi pengungkapan informasi umum adalah 32,60% yang tergolong kepada kurang transparan. Dimana, provinsi dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 41,78% yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara provinsi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 22,02% yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara.
3. Tingkat transparansi situs web resmi pemerintah daerah kabupaten/kota pada segi manajerial dan administrasi adalah 34,69% yang tergolong kepada kurang transparan. Dimana, provinsi dengan

nilai rata-rata tertinggi sebesar 40,38% yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara. Sementara provinsi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 27,41% yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara.

4. Tingkat transparansi situs web resmi pemerintah daerah kabupaten/kota pada segi manajerial dan administrasi adalah 49,29% yang tergolong kepada kurang transparan. Dimana, provinsi dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 57,92% yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara provinsi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 36,25% yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Tingkat transparansi situs web resmi pemerintah daerah kota lebih unggul daripada situs web resmi pemerintah daerah kabupaten dengan perbedaan sebesar 04,78%. Dimana pemerintah daerah kota memiliki tingkat transparansi dengan nilai rata-rata sebesar 44,57% sedangkan pemerintah daerah kabupaten memiliki tingkat transparansi dengan nilai rata-rata sebesar 39,79%. Pemerintah daerah kota lebih baik kualitas tingkat transparansinya meskipun kuantitasnya yang sedikit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang antara lain adalah:

1. Karena model yang diambil adalah model indikator MTI yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi di negara Portugal, maka berdampak kepadabanyaknya indikator yang bernilai 0 atau tidak

diungkapkan oleh pemerintah daerah di Kalimantan dan Indonesia bagian timur akibat dari perbedaan sistem pemerintahannya.

2. Dalam pengumpulan sampel berdasarkan purposive sampling, penulis hanya menggunakan empat dokumen pelaporan saja. Dokumen laporan tersebut ialah LAKIP, LRA, neraca dan laporan arus kas.
3. Hasil dan analisis yang didapatkan berdasarkan pada saat penulis melakukan observasi pada situs web pemerintah daerah/kota. Dimana observasi dilakukan pada bulan maret hingga april tahun 2019. Apabila terjadi perubahan dalam situs web pemerintah daerah kabupaten/kota pada saat menyelesaikan tulisan, maka penulis tidak memasukan hal tersebut kedalam hasil dan analisis penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat antara lain adalah:

1. Karena setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda maka lebih baik indikator yang digunakan disesuaikan dengan pemerintahan di negara yang bersangkutan untuk penelitian selanjutnya. Karena beberapa indikator mungkin tidak relevan dengan indikator yang ada dinegara tersebut.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan dokumen pelaporan yang lain yang ada di pemerintah daerah seperti halnya laporan operasional,

catatan atas laporan keuangan, RPJD, RPJMD, APBD dan sebagainya sebagai dasar pengambilan sampel.

3. Situs web pada pemerintah daerah dapat sangat berguna bagi masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Maka dari itu pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi pada situs webnya dengan memberikan pelatihan mengenai hal-hal yang harus diungkapkan di situs web kepada karyawan yang bertugas untuk mengelola situs web tersebut.

